

Dampak Krisis Malaise Terhadap Sektor Perkebunan di Keresidenan Palembang 1929-1934

Farida R. Wargadalem^{1*} dan Nanda Julian Utama²

¹Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya
Jl. Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan – Indonesia

²Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Semarang
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah – Indonesia

*Alamat korespondensi: farida_wd@fkip.unsri.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.14710/jscl.v9i1.56977>

Diterima/ Received: 2 Agustus 2023; Direvisi/ Revised: 23 Juni 2024; Disetujui/ Accepted: 28 Juni 2024

Abstract

The impact of the malaise crisis that hit the world economy towards the beginning of the 1930s spread to the Palembang Residency area because it was still under the rule of the Dutch East Indies colonial government. At the beginning of the 20th century, Palembang became one of the areas considered profitable by the Dutch East Indies colonial government. The plantation sector plays an essential role in the Palembang region because almost 90 percent of rubber and coffee plantations are managed by Palembang's people. In the early to mid-1920s, there was an increase in sales of plantation commodities in Palembang. However, when malaise occurred in 1929, the community could not face these conditions and situations. The community still does not understand the possible economic crisis that will happen. On the other hand, people are consumerists, so they have no remaining profits from previous sales. Through historical methods, this research reveals the impact of the malaise, which has had a significant effect on the economy of Palembang region, especially in the plantation sector. The malaise also extends to other industries related to these two superior plantation commodities, especially the local shipping which is coffee and rubber commodities.

Keywords: Malaise; Plantation; Economic Crisis; Life Style.

Abstrak

Dampak krisis malaise yang melanda perekonomian dunia menjelang awal 1930-an meluas sampai wilayah Keresidenan Palembang karena berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada awal abad ke-20, Palembang menjadi salah satu wilayah yang dianggap menguntungkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sektor perkebunan memegang peranan penting di wilayah Palembang karena hampir 90 persen perkebunan karet dan kopi dikelola oleh masyarakat Palembang. Pada awal hingga pertengahan 1920-an, terjadi peningkatan penjualan komoditas hasil perkebunan wilayah Palembang. Namun, ketika malaise terjadi pada 1929, masyarakat tidak mampu menghadapi kondisi dan situasi yang sedang terjadi. Masyarakat masih belum memiliki pemahaman terkait kemungkinan-kemungkinan situasi ekonomi yang akan terjadi. Di sisi lain, masyarakat memiliki sifat konsumtif sehingga mereka tidak memiliki sisa keuntungan dari penjualan sebelumnya. Melalui metode sejarah, kajian ini mengungkap dampak malaise yang berpengaruh signifikan bagi perekonomian Palembang, terutama pada sektor perkebunan. Selain itu, dampak malaise meluas sampai ke sektor lain yang berhubungan dengan dua komoditas utama hasil perkebunan, yaitu komoditas kopi dan karet.

Kata Kunci: Malaise; Perkebunan; Krisis Ekonomi; Gaya Hidup.

Pendahuluan

Palembang memiliki fakta historis yang menarik untuk diungkap karena wilayah tersebut telah menjadi pusat dari beberapa entitas politik besar, mulai dari Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Palembang, Kesultanan Palembang, hingga

akhirnya Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang mulai menduduki wilayah Palembang pada awal abad ke-19. Kemahsyuran komoditas hasil bumi yang tersebar di berbagai wilayah di Palembang telah ada sejak masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Komoditas hasil bumi tersebut memiliki

nilai tinggi di pasar dunia, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa penguasaan atas Palembang memberikan nilai ekonomi penting bagi penguasa yang berhasil menduduki wilayah tersebut (Wargadalem 2017).

Palembang juga sering dikenal sebagai wilayah *wingewest* atau daerah yang menguntungkan di luar Pulau Jawa oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada awal abad ke-19. Hal itu dikarenakan wilayah tersebut mampu memberikan keuntungan ekonomi yang cukup signifikan bagi pemerintah kolonial. Beberapa komoditas unggulan pada abad ke-19 yang dihasilkan adalah lada dan kopi yang tumbuh subur di wilayah Uluwu (pedalaman) Palembang (Zed 2003, 76).

Selanjutnya pada awal abad ke-20, wilayah Palembang mulai mengenal penanaman tanaman karet, sehingga semakin menambah variasi komoditas unggulan di wilayah itu. Karet kemudian menjadi tanaman yang paling banyak diincar untuk ditanami, sehingga pada 1910-an hasil produksi karet di Palembang jumlahnya cukup besar. Selain itu, ditemukannya potensi minyak bumi dan batu-bara di wilayah Keresidenan Palembang semakin memperkuat posisi Palembang yang sangat strategis dalam mendukung perekonomian Hindia-Belanda (Zed 2002, 297-298).

Meskipun demikian, pemerintah kolonial tidak mengelola sektor perkebunan, khususnya perkebunan kopi dan karet. Lebih dari 90% pengelolaan komoditas kopi dan karet lebih banyak dikelola oleh rakyat Palembang sendiri dan etnis Tionghoa sebagai pedagang perantara atau *middle man*. Hal itu dikarenakan pemerintah kolonial tidak mampu mengelola berbagai potensi yang ada sehingga pemerintah kolonial dan perusahaan-perusahaan Eropa tidak menguasai seluruh sektor perekonomian di Palembang. Kondisi tersebut mengubah perekonomian rakyat Palembang pada saat itu menjadi lebih baik karena memberikan keuntungan secara personal bagi mereka yang terlibat langsung dalam bisnis, baik perkebunan karet maupun kopi yang tersebar dari hulu hingga hilir. Hal itu dikarenakan dua komoditas tersebut memiliki nilai ekonomis tinggi yang menjanjikan menjelang awal 1929 (Wellan 1932, 266). Kondisi

ekonomi rakyat yang menjadi lebih baik dapat dilihat dari simbol-simbol kekayaan yang mereka tunjukkan, antara lain membeli mobil, membangun rumah-rumah besar, bahkan sampai menunaikan ibadah haji (Utama dan Sunarti 2017).

Namun, kondisi tersebut tidak berlangsung lama. Hal itu dikarenakan pada akhir 1920-an perekonomian dunia dilanda krisis besar yang dikenal pula dengan malaise. Krisis tersebut telah mengubah kondisi kehidupan masyarakat Hindia-Belanda yang diperkirakan semakin maju menjelang akhir 1920-an karena meningkatnya aktivitas perdagangan dan ekspor di Hindia-Belanda. Namun, perkiraan tersebut meleset ketika dunia mengalami krisis tersebut (Rickelfs 2008, 399-403).

Malaise tidak hanya berdampak bagi komoditas ekspor unggulan seperti minyak bumi, gula, karet, dan kopi karena terjadi penurunan harga. Akan tetapi, malaise turut memberikan dampak langsung bagi perekonomian masyarakat Palembang yang sangat bergantung pada perdagangan komoditas hasil bumi. Kondisi tersebut tentu melenyapkan masa kejayaan perekonomian masyarakat Keresidenan Palembang karena masyarakat terus mengalami kerugian.

Belum ada tulisan yang secara spesifik membahas dampak langsung dari krisis malaise di Palembang karena beberapa tulisan yang telah ada sebelumnya lebih banyak berfokus pada dampak malaise di Jawa seperti yang telah dilakukan oleh Padmo (2013). Zed (2003, 2002) dalam kajiannya pun hanya menyinggung sedikit mengenai dampak malaise di Palembang. Meskipun kajian dari Irwanto (2017) menyinggung tentang dampak malaise di Palembang, namun demikian tulisan ini lebih menekankan pada simbol-simbol perekonomian di daerah pedalaman Keresidenan Palembang, terutama pada tokoh-tokoh elit lokal marga di Keresidenan Palembang. Oleh karena itu, tulisan ini berfokus pada dampak malaise di Palembang dan respons masyarakat dalam menghadapi krisis itu, terutama masyarakat yang terlibat langsung dalam bisnis perkebunan di Palembang pada kurun waktu 1929-1934.

Metode

Penelitian ini disusun dengan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan penelitian (Kuntowijoyo 1994; Padiatra 2020). Sumber utama dalam tulisan ini terdiri dari arsip sezaman, surat kabar lokal sezaman seperti *Pertja Selatan* dan surat kabar terbitan sezaman seperti *Koloniaal Verslaag*. Berbagai sumber primer tersebut kemudian dilengkapi dengan berbagai sekunder yang memuat informasi terkait malaise di Palembang pada masa kolonial.

Berbagai sumber yang telah didapat kemudian melewati proses kritik sumber untuk menemukan fakta-fakta sejarah yang kredibel sebelum disusun dan dirangkai menjadi sebuah tulisan.

Kejayaan Ekonomi Keresidenan Palembang: Perkembangan Perkebunan Karet dan Kopi Rakyat

Selama 30 tahun pertama pada abad ke-20, Palembang tumbuh sebagai kota dagang penting di Hindia Belanda yang memiliki berbagai komoditas ekspor. Hal itu disebabkan oleh pengelolaan maksimal atas potensi alam yang berlimpah di Palembang, sehingga tidak hanya memberikan keuntungan bagi pemerintah kolonial saja melainkan turut menyejahterakan masyarakat Palembang. Terdapat dua jenis komoditas ekspor yang paling menguntungkan di Palembang pada awal abad 20, yaitu karet dan kopi.

Karet dan kopi merupakan dua dari beberapa komoditas yang cukup populer di Palembang pada awal abad ke-20. Hal itu dikarenakan kepemilikan perkebunan atas dua komoditas tersebut lebih banyak dikuasai oleh masyarakat Palembang melalui otoritas politik lokal atas dasar marga di bawah kekuasaan pasirah-pasirah sebagai pemimpin marga (Hens 1909, 23-25). Adapula hal tersebut dapat terjadi karena tidak adanya konflik antara rakyat dengan pemerintah kolonial saat itu. Hal itu disebabkan oleh pemerintah dan perusahaan swasta di Palembang pada masa itu lebih mengutamakan sektor pertambangan karena dianggap lebih menguntungkan (Zed 2003, 88-89).

Pada dasarnya, karet bukan tanaman yang baru dikenal oleh masyarakat. Namun, jenis *Hevea Brasiliensis* baru dikenal pada awal abad ke-20. Sebelumnya, masyarakat telah mengenal “Rambung” sebagai salah satu jenis tanaman getah yang banyak ditemukan di wilayah pedalaman Palembang. Akan tetapi, hasilnya memiliki kualitas yang kurang baik dan bernilai rendah di pasaran (Purwanto 2002, 204-205). Ketika jenis *Hevea Brasiliensis* mulai ditanam secara massif pada 1910-an, tanaman karet jenis ini menjadi primadona baru dalam komoditas hasil perkebunan di Palembang. Hal itu menarik perhatian petani untuk membudidayakan tanaman karet jenis itu. Sampai pada menjelang 1920, total pohon karet yang ditanam berhasil mencapai enam juta batang dan dua juta di antaranya telah menghasilkan getah (Purwanto 1992, 199-207).

Tingkat produksi karet yang dilakukan oleh rakyat bahkan mampu mengalahkan jumlah produksi yang dilakukan oleh berbagai perusahaan asing pada 1920-an. Hal itu tampak dalam Tabel 1 yang menunjukkan perbedaan jumlah produksi karet antara yang dihasilkan oleh rakyat dengan yang diproduksi oleh perusahaan.

Tabel 1. Perbandingan Produksi Karet Rakyat dan Karet Perusahaan Swasta (dalam ton).

Tahun	Karet Rakyat	Karet Perusahaan Swasta
1921	58	-
1922	586	-
1923	3.200	-
1924	6.506	-
1925	11.951	242
1926	11.488	313
1927	15.082	498
1928	12.509	668
1929	15.687	718
1930	10.358	-

Sumber: Wellan 1932, 266 & 269.

Berdasar pada Tabel 1 tersebut, dapat dilihat bahwa lebih dari 90% produksi karet di Keresidenan Palembang pada abad ke-20 didominasi oleh produksi karet rakyat. Penyebab rakyat lebih memilih untuk menanam karet karena pada saat itu harga jual karet cukup tinggi dan lebih

stabil. Bahkan harga karet pernah mencapai f. 175 dan naik ke angka f. 202 pada 1925 (Tjahaja Palembang (1925)).

Selain karet, hasil bumi yang cukup memberi dampak signifikan bagi perekonomian masyarakat Palembang adalah kopi. Jenis tanaman ini telah dibudidayakan lebih dulu dibandingkan karet. Perkebunan kopi banyak tersebar di wilayah yang agak jauh dari pusat kota Palembang sejak abad ke-19. Perkebunan kopi tersebut tersebar di sekitar pegunungan Bukit Barisan, terutama wilayah sekitar Lahat, Pagaralam, Muara Enim, dan Ampat Lawang. Kopi baru mulai populer bersamaan dengan karet karena pada awalnya tanaman ini hanya menjadi tanaman pelengkap saja di antara kebun-kebun milik warga. Namun, pada tahun-tahun berikutnya harga kopi mulai naik dan banyak dicari oleh pedagang sehingga perkebunan kopi mulai meluas pada tahun-tahun berikutnya (Blink 1926, 53-54).

Kepopuleran kopi yang berkembang secara bertahap dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pada dasarnya harga kopi cenderung fluktuatif pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Harga kopi dapat naik pada masa tertentu sehingga produksinya menjadi meningkat seperti yang terjadi pada pertengahan abad ke-19 di Palembang yang mencapai f. 56 per pikul. Namun, pada pertengahan 1910-an, angka produksi kopi di Palembang menurun drastis dan mengkhawatirkan. Bahkan, angka produksi kopi sempat mencampai hanya sekitar 3 kuintal pada 1913. Penyebab lainnya dapat dimungkinkan oleh ketersediaan tanah. Permasalahan yang muncul adalah belum ada lahan di wilayah dataran tinggi Palembang yang disiapkan secara khusus untuk menanam kopi. Hal itu dikarenakan masyarakat belum memiliki kemampuan berladang yang baik untuk kelangsungan tanah (Utama 2017, 56). Namun, pada akhirnya kopi mulai menjadi komoditas unggulan di Palembang sejak 1920-an. Perkebunan kopi yang terdapat di Palembang pada saat itu juga didominasi oleh kopi rakyat disbanding perkebunan kopi swasta.

Dominasi perkebunan kopi yang dikelola oleh rakyat tampak dari Tabel 2 yang menunjukkan bahwa 90% pasokan kopi dari Palembang pada 1920-an dihasilkan dari perkebunan rakyat. Sama halnya dengan karet, kopi turut mendorong

perekoniman masyarakat Palembang pada masa kolonial. Hal itu dikarenakan nilai ekspor dua komoditas tersebut melonjak dari 2,8 juta Gulden pada 1914 menjadi 56,01 juta Gulden pada 1925 (Wellan 1932, 224).

Tabel 2. Perbandingan Produksi Kopi Rakyat dan Perusahaan Swasta (dalam ton).

Tahun	Kopi Rakyat	Kopi Swasta	Perusahaan
1923	12.026	1.149	
1924	19.881	1.678	
1925	20.981	1.354	
1926	25.364	1.480	
1927	23.407	1.594	
1928	28.229	1.257	
1929	17.818	1.679	

Sumber: Zed 2003, 86.

Aktivitas perdagangan yang terus meningkat tidak hanya berpengaruh bagi perekonomian masyarakat Palembang, tetapi turut memengaruhi perkembangan jaringan transportasi, khususnya sungai. Sungai memiliki arti penting karena menjadi jalur utama distribusi barang dan orang di Palembang (Utama 2016, 2-3). Akibat dari perkembangan pesat komoditas karet dan kopi, transportasi sungai mulai berkembang untuk mengangkut hasil kebun dari Uluan (pedalaman) Palembang. Modernisasi yang cukup signifikan pada moda transportasi sejak awal abad ke-20 pun semakin menunjang pendistribusian komoditas ekspor dan aktivitas perdagangan di Palembang (Utama dan Wargadalem 2017).

Perubahan Gaya Hidup Masyarakat Palembang

Perkembangan dan pertumbuhan perkebunan karet dan kopi rakyat yang cukup pesat di Palembang berpengaruh bagi perekonomian masyarakat sekaligus mengubah gaya hidup masyarakat. Perubahan gaya hidup itu terjadi karena peningkatan perekonomian masyarakat. Sepanjang 13 tahun pertama proses penanaman dan sadap karet, jumlah keseluruhan pendapatan yang diterima oleh petani di Palembang mencapai 95 juta Gulden. Pendapatan tersebut belum diakumulasikan dengan pihak-pihak yang terlibat

secara langsung maupun tidak langsung, seperti makelar, pedagang kecil dan besar, serta para pemilik transportasi Sungai (Purwanto 2002, 218).

Perubahan gaya hidup itu salah satunya dapat dilihat dari pembangunan rumah-rumah besar dengan biaya pembangunan yang mahal. Rumah adat Palembang yang disebut dengan rumah limas biasanya hanya diperuntukkan bagi sultan dan kerabatnya. Golongan lain juga dapat memiliki jenis rumah adat seperti itu, namun biasanya hanya golongan pembesar masyarakat seperti Hadrami di Palembang. Hal itu dikarenakan pembangunan rumah dengan bentuk rumah limas memerlukan biaya yang besar. Pada awal abad ke-20, pembangunan rumah limas membutuhkan dana sekitar f. 5.000 – f. 15.000. Akan tetapi, para petani karet yang ada di pedalaman Palembang telah mampu membangun rumah limas (Purwanto 2002, 219).

Selain itu, perubahan gaya hidup masyarakat dapat dilihat dari tingkat konsumsi mereka. Masyarakat mulai mengadopsi gaya hidup Barat seperti mulai mengonsumsi makanan kaleng dan menggunakan busana dengan gaya Barat pula. Hal tersebut kemudian yang melatar belakangi masuknya barang-barang impor ke Palembang pada awal abad ke-20. Barang-barang tersebut antara lain berupa jam tangan, rokok, ranjang besi, gramofon, mebel, sutera, dan lain-lain. Sementara itu, perubahan dalam berpakaian juga dipengaruhi oleh iklan-iklan pada surat kabar (Utama 2017, 88-90).

Akibat perubahan gaya hidup dan peningkatan konsumerisme masyarakat, impor kendaraan darat juga mulai marak terjadi pada awal abad ke-20. Tercatat sejak 1910 sampai 1929 terdapat 19.000 sepeda yang terjual di Palembang. Sepeda dan mobil pada saat itu termasuk dalam kategori barang mewah, sehingga tidak semua orang dapat memiliki (Purwanto 2002, 219-220). Namun, pendapatan yang tinggi akibat perdagangan karet dan kopi memungkinkan mereka untuk membeli mobil yang sebelumnya dianggap sebagai barang mewah. Setidaknya terdapat sekitar 300 mobil yang masuk di Palembang pada 1922. Jumlah tersebut kemudian terus meningkat pada 1924 menjadi sekitar 1.300 mobil dan terus meningkat samoau dua kali lipat

pada 1930 berjumlah 6.462 pembelian mobil di Palembang (Zed 2003, 110).

Perubahan gaya hidup masyarakat selanjutnya mulai memengaruhi kedudukan sosial masyarakat. Perkembangan ekonomi di Palembang kemudian turut meningkatkan minat masyarakat untuk menunaikan ibadah Haji. Selain menunaikan salah satu kelengkapan ibadah, ibadah Haji juga menjadi simbol sosial sekaligus pelengkap kekayaan individu dalam masyarakat di Palembang. Jumlah jamaah haji yang asal Palembang pada 1911 hanya sekitar 1.551 orang. Namun, jumlah jamaah meningkat drastis 1920-an. Jumlah jamaah haji tertinggi terdapat pada 1927 yang berjumlah sekitar 7.341 jamaah (Rahim 1998, 183-192).

Krisis Malaise dan Dampaknya bagi Masyarakat Palembang 1929-1930

Masa kejayaan perkebunan karet dan kopi yang berlangsung pada masa Pemerintah Kolonial Belanda pada akhirnya tidak berlangsung lama. Jumlah pendapatan tinggi yang diterima oleh masyarakat Palembang hanya bersifat sementara pula. Hal itu disebabkan oleh perekonomian Hindia Belanda, termasuk Palembang diterpa oleh krisis ekonomi besar dunia yang dikenal pula dengan istilah malaise. Pada awalnya, malaise menyerang saham di *wall street* pada September dan Oktober 1929. Akibatnya, terjadi penurunan harga saham secara drastis yang memengaruhi harga-harga barang dari beberapa komoditas di dunia. Di Amerika Serikat, malaise berdampak langsung pada penyusutan investasi, penurunan daya beli masyarakat, guncangan pada sektor industri, dan terjadi peningkatan angka pengangguran (Bernstein 1989).

Selain itu, malaise diduga pula sebagai efek jangka panjang pasca Perang Dunia I yang telah berakhir pada 1918. Sebagai salah satu negara yang menang dalam pertempuran, Amerika Serikat mulai muncul sebagai raksasa industri. Hindia Belanda kemudian tumbuh menjadi salah satu wilayah yang mengirim barang-barang mentah ke Amerika Serikat. Di sisi lain, terdapat fenomena kelebihan produksi dan kelebihan sebaran barang mentah menjelang malaise. Ketika perekonomian Amerika Serikat mulai jatuh dan berdampak pada

sektor industri, Hindia Belanda sebagai salah satu negara penyokong kemudian turut terdampak karena banyak barang mentah yang tidak laku di pasaran dunia, salah satunya adalah karet (Akob dan Junaidi 2024). Sementara itu, pemerintah kolonial sangat bergantung pada keuntungan hasil ekspor, terutama dari sektor pertambangan dan perkebunan. Namun, malaise justru menyerang nilai berbagai komoditas tersebut dan dampaknya terjadi dari atas sampai ke tingkatan paling bawah (Rcikelfs 2008).

Pada awalnya, pemerintah kolonial tidak mampu menafsirkan kondisi yang sedang terjadi pada saat itu. Dampak umum dari malaise yang awal-awal dirasakan oleh pemerintah kolonial adalah pemutusan kontrak kerja baik di sektor perkebunan maupun di kantor pemerintah. Kemudian, jumlah penanaman modal asing di Hindia Belanda mulai mengalami penurunan secara dratis. Meskipun perubahan-perubahan itu merupakan dampak umum, namun kondisi itu berdampak langsung bagi masyarakat yang berkaitan langsung dengan memproduksi komoditas ekspor, misalnya di Palembang.

Perkebunan karet dan kopi merupakan sektor yang paling terdampak di Palembang, sehingga terus mengalami kerugian. Walaupun produksi karet tetap dijalankan dengan jumlah yang banyak, tetapi petani tidak mendapatkan keuntungan sama sekali (Padmo 2013, 150). Selain berdampak pada komoditas karet, kopi juga turut terdampak akibat malaise. Harga kopi mulai mengalami penurunan karena harganya yang mulai jatuh. Para petani kopi di Palembang mengeluh akan harga kopi yang hanya dihargai f. 10 sampai mencapai f. 6 per pikul dan tetap tidak laku (*Han Po* 1930a).

Jatuhnya harga jual karet dan kopi sangat memengaruhi perekonomian masyarakat. Akibat malaise, tidak ada keuntungan yang diterima oleh masyarakat dari hasil penjualan karet dan kopi. Keuntungan yang diterima dari penjualan karet di wilayah Keresidenan Palembang pada 1927 masih mencapai kurang lebih sekitar f. 23.000.000. Namun, ketika malaise melanda, keuntungan yang didapat dari penjualan karet turun drastis ke f. 3.500.000 pada 1930. Sampai pada 1932, keuntungan dari penjualan karet hanya sebesar f. 420.000. Komoditas kopi juga mengalami hal yang

sama. Keuntungan yang diraih mengalami penurunan pada 1932 sebesar f. 6.420.000. Sebelumnya, keuntungan penjualan kopi di Palembang pada 1927 mencapai f. 37.000.000 (*Pertja Selatan* 1993b).

Pada dasarnya, penurunan harga komoditas perkebunan telah dirasakan sejak 1928. Namun, kondisi yang sangat merugikan tidak diantisipasi oleh para petani dan pengusaha yang bergerak pada sektor komoditas ekspor. Selain itu, krisis malaise tidak dijelaskan dan dianalisis oleh surat kabar lokal. Pada saat itu berita-berita dengan tema politik masih menjadi pilihan utama para redaktur dibandingkan membahas tentang kondisi yang sedang terjadi di Palembang. Selain itu, pemahaman ekonomi hanya terbatas pada bursa harga komoditas kopi dan karet setiap minggu (*Pertja Selatan* 1930).

Fenomena dengan pola yang sama sempat terjadi sebelum 1929. Jatuhnya harga jual karet yang terjadi selama periode 1919-1922 juga terjadi pada masa malaise. Namun, ketika malaise melanda perekonomian masyarakat, mereka mengalami ketidaksiapan dalam menghadapi situasi yang sedang terjadi saat itu dan dampaknya meluas ke berbagai bidang (Utama 2017, 102).

Ketidakstabilan harga karet dan kopi seharusnya dapat dianalisa dan dipahami oleh masyarakat. Namun, akibat tidak ada pemahaman yang baik terkait pengelolaan pendapatan, para petani dan pengusaha lokal tidak mampu menghadapi krisis malaise yang mulai melanda di wilayah Palembang. Keuntungan yang sebelumnya telah didapat hanya tersisa seadanya karena uang yang dihasilkan dari penjualan karet dan kopi sudah habis untuk memenuhi sifat konsumerisme dan hedonisme masyarakat itu sendiri. Termasuk salah satunya melaksanakan ibadah haji bukan untuk kepentingan agama, melainkan untuk kepentingan sosial sebagai simbol kekayaan mereka telah lengkap (Utama 207, 101-102).

Selain kerugian yang dialami oleh sektor komoditas karet dan kopi, sektor pertambangan juga mengalami kerugian. Hal itu dirasakan langsung oleh perusahaan-perusahaan besar di Palembang yang terkena dampak langsung dari malaise. Perusahaan minyak seperti *Bataafse Petroleum Maatschappij* (BPM) dan *Nedelandsche Koloniale Petroleum Maatschappij*

(NKPM) pada 1931 hingga 1934 melakukan pengurangan jumlah pegawai akibat krisis malaise. Pengurangan tersebut berkaitan dengan penghematan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Namun, kebijakan perusahaan tersebut dipandang rasial karena mayoritas pekerja yang diberhentikan berasal dari golongan Bumiputra (*Pertja Selatan* 1931a, 1934).

Pada perkembangannya, masyarakat mulai menyadari bahwa kondisi yang sedang mereka hadapi adalah krisis malaise. Pemahaman tersebut mereka dapatkan melalui surat kabar lokal yang mulai memuat informasi terkait berbagai peristiwa yang berkaitan dengan malaise. Krisis malaise yang berdampak langsung bagi perekonomian rakyat menimbulkan tingginya angka kriminalitas karena masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhannya lagi seperti sebelumnya (*Pertja Selatan* 1931b).

Dampak krisis malaise juga dirasakan oleh bidang telekomunikasi. Bidang tersebut bertanggung jawab dalam pemutusan jaringan telepon. Pemutusan jaringan telepon itu dilakukan bagi pemilik toko dan perusahaan. Hal itu disebabkan oleh usaha mereka telah merugi sehingga tidak mampu membayar tagihan telepon yang berimbas pada pemutusan jaringan (*Pertja Selatan* 1933a).

Dapat dikatakan bahwa dampak dari krisis malaise meluas ke berbagai bidang maupun aspek, baik bagi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda maupun masyarakat yang ada di wilayah kekuasaan mereka. Salah satu bidang yang paling adalah ekonomi. Dampak langsung bagi perekonomian tidak hanya terbatas pada aktivitas perdagangan, ekspor impor, dan pendapatan masyarakat. Akibat terjadi penurunan pendapatan masyarakat karena merugi atas penjualan karet dan kopi, masyarakat tidak lagi mengunjungi fasilitas-fasilitas publik yang sebelumnya dibangun ketika perekonomian mereka sedang meningkat. Ketika terjadi peningkatan pendapatan pada masyarakat di Palembang, pemerintah kolonial bersama pihak-pihak swasta membangun berbagai fasilitas public, salah satunya bioskop. Hal itu didasarkan pada perubahan gaya hidup masyarakat yang mulai kebarat-baratan. Namun, agenda rutin masyarakat ke bioskop dan tempat hiburan lain harus terhenti akibat malaise. Ketika malaise melanda mereka

dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka tidak mampu lagi untuk membayar tiket bioskop. Meskipun bioskop tetap ramai, sebagian besar penonton masuk tanpa tiket sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak pengelola bioskop (*Pertja Selatan* 1931; *Pertja Selatan* 1934).

Bagi sektor pelayaran, dampak yang dirasakan akibat malaise adalah melemahnya permintaan pendistribusian komoditas karet dan kopi dari pedalaman ke luar. Hal itu sangat berdampak bagi bisnis pelayaran sungai karena bisnis tersebut sangat bergantung pada distribusi komoditas hasil alam. Misalnya, pendistribusian muatan kapal menuju ke Singapura yang turut mengalami penurunan. Sementara itu, pengiriman komoditas kopi dan karet menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar dari penyewaan jasa distribusi barang di sungai-sungai Keresidenan Palembang (*Han Po* 1930b).

Dampak krisis malaise yang melanda dunia dan turut dirasakan oleh wilayah Palembang sebagai salah satu wilayah kekuasaan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mulai mereda memasuki 1934. Pada periode itu, harga komoditas ekspor perkebunan seperti karet mulai membaik. Selain itu, pemerintah kolonial mulai memperkenalkan kebijakan terkait pembatasan produksi karet dengan program *Rubber Restrictie* atau dikenal dengan istilah Kupon Karet di Palembang (Zed 2002, 305-306). Keberadaan kupon tersebut memberikan kesempatan bagi petani untuk menjual karet dengan harga tertentu. Harga-harga itu telah diketahui sebelumnya oleh para petani melalui agen perusahaan yang menerima karet dari petani. Kebijakan tersebut perlahan mulai membangkitkan kembali perekonomian masyarakat Palembang, meskipun perkembangannya tidak terjadi secara pesat seperti periode sebelumnya. Namun demikian, Palembang tetap menjadi penghasil karet terbesar hingga akhir 1940-an (Ricklefs 2008, 402-403).

Simpulan

Kemampuan masyarakat dalam mengelola komoditas ekspor seperti kopi dan karet memberikan keuntungan besar sehingga mampu meningkatkan kondisi perekonomian mereka. Selain itu, minimnya konflik yang terjadi antara

penguasa dan masyarakat turut mendorong perkembangan pesat yang terjadi di Palembang pada awal abad ke-20. Namun, krisis malaise yang terjadi pada 1929 mengubah kondisi perekonomian masyarakat Palembang dalam waktu singkat.

Dampak yang disebabkan oleh krisis malaise meluas pada berbagai bidang di Palembang. Krisis malaise memengaruhi harga jual komoditas kopi dan karet sehingga masyarakat tidak mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan. Kerugian yang dirasakan kemudian memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan berdampak bagi sektor ekonomi lainnya. Namun, masyarakat tidak mampu menghadapi situasi tersebut karena keuntungan sebelumnya telah habis akibat tingkat konsumerisme dan hedonisme yang tinggi. Kebanyakan uang yang didapatkan dari keuntungan bisnis telah habis untuk memenuhi hasrat akan simbol-simbol sosial. Hal itu berimbas ketika malaise menyerang, mereka telah kehabisan modal untuk bertahan. Meskipun pada akhirnya Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi malaise, tetapi pada masa selanjutnya harga karet akan sangat fluktuatif, bisa tinggi melebihi ekspektasi dan bisa juga sangat rendah melebihi ambang batas kewajaran. Meskipun demikian, masyarakat telah memiliki pengalaman terkait pola-pola bertahan jika suatu saat menghadapi kondisi yang sama, setidaknya selama masa Kolonial Belanda.

Referensi

- Akob, Bachtiar, dan Teuku Junaidi. 2014. "Malaise dan Pengaruhnya terhadap Gerakan Nasional Indonesia." *Jurnal Seuneubok Lada* 2 (1): 16–30.
- Bernstein, Michael F. 1989. *The Great Depression, Delayed Recovery and Economic Change in America, 1929–1939*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Blink, H. 1926. *Opkomst En Ontwikkeling Van Sumatra Als Economisch Geographisch Gebied*. Gravenhage: Mouton & Co.
- Han Po. 1929. "No Title," 15 November 1929.
- Han Po. 1930a. "No Title," 5 Juli 1930.
- Han Po. 1930b. "No Title," 1 November 1930.
- Hens, AM. 1909. *Het Grondbezit in Zuid-Sumatra*. Rotterdam: Nigh & Van Ditmar.
- Irwanto, Dedi. 2017. "Malaise Dan Lambang Kekayaan Ekonomi Penguasa Lokal Di Palembang, 1929–1942." *Lembaran Sejarah* 13 (1): 48–71.
- Kolonial Verslaag. 1914. *Kolonial Verslaag*. -: -.
- Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Linblad, Thomas. 2002. *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Padiatra, Aditia Muara. 2020. *Ilmu Sejarah: Metode dan Praktik*. Gresik: CV. Jendela Sastra Pers.
- Padmo, Sugijanto. 1991. "Depresi 1930-an Dan Dampaknya Pada Hindia Belanda." *Humaniora* 0 (2). <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jh.2159>.
- Peeters, Jeroen. 1997. *Kaum Tuo Kaum Mudo, Perubahan Relijius Di Palembang 1821-1942*. Jakarta: INIS.
- Pertja Selatan*. 1930. "Malaise di Indonesia," 8 Maret 1930.
- Pertja Selatan*. 1931a. "Nasibnja Kaoem Boeroeh Berserikatlah !," 7 Juli 1931.
- Pertja Selatan*. 1931b. "Malaise, Ajam Poen Loemajan," 1 Agustus 1931.
- Pertja Selatan*. 1933a. "Hebatnja Malaise," 2 Februari 1933.
- Pertja Selatan*. 1933b. "Penghidoepan Rakjat Di Gewest Palembang," 8 Juni 1933.
- Pertja Selatan*. 1934. "Palembang 'Sorga' Doenia," 12 Juni 1934.
- Pertja Selatan*. 1931. "Siapa Sebenarnja Lebih Oentoeng." *Petja Selatan*, 24 September 1931.
- Purwanto, Bambang. 1992. *From Dusun To The Market: Native Rubber Cultivation in Southern Sumatra 1890-1940*. London: University of London.
- Purwanto, Bambang. 2002. "Ekonomi Karet Rakyat, Tahun 1890an-1940." In *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, edited by Thomas Linblad. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahim, Husni. 1998. *Sistem Otoritas Dan Administrasi Islam, Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan Dan Kolonial Di Palembang*. Jakarta: PT. Logos.
- Rickelfs, MC. 2008. *Sejarah Indonesia Modern*.

Yogyakarta: Serambi.

- Tjahaja Palembang. 1925. "Rubber Boemipoetra Di Palembang." *Tjahaja Palembang*, 2 November 1925.
- Tjahaja Palembang. 1926. "Pengaruh Para Mahal." *Tjahaja Palembang*, 21 Januari 1926.
- Utama, Nanda Julian. 2016. "Pasang Surut Jaringan Transportasi Sungai Di Keresidenan Palembang 1900-1942." In *Konferensi Nasional Sejarah X*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Utama, Nanda Julian. 2017. "Perdagangan Dan Pelayaran Di Keresidenan Palembang 1900-1930." Thesis, Universitas Indonesia.
- Utama, Nanda Julian. 2023. *Warisan Jalur Rempah: Sejarah Pelayaran Sungai Dan Perdagangan Di Palembang*. Klaten: Penerbit Lakeisha.
- Utama, Nanda Julian, dan Linda Sunarti. 2017. "The Impact of Economic Modernization on the Lifestyle of the Palembang Society in 1900–1930." In *Cultural Dynamics in a Globalized World*, 733–39. Routledge.
- Utama, Nanda Julian, and Farida R Wargadalem. 2017. "Modernization of Shipping and River Sailing Business in Palembang 1860–1930." *Advanced Science Letters* 23 (10): 9959–61.
- Wargadalem, Farida R. 2017. *Kesultanan Palembang Dalam Arus Konflik (1804-1825)*. Jakarta: EFEO.
- Wellan, J.W.J. 1932. *Zuid-Sumatra, Economisch Overzicht Van De Gewesten Djambi, Palembang, de Lampongsche Disctricten En Benkoelen*. Wageningen: H. Veenman & Zonen.
- Zed, Mestika. 2002. "Ekonomi Dualistis Palembang Pada Periode Kolonial Akhir." In *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, edited by Thomas Linblad. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zed, Mestika. 2003. *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*. Jakarta: LP3ES.